

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

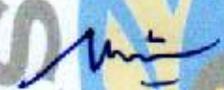
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN POLIGAMI**

Oleh:
RUKMIYANTHY ABDUL
NIM : 271414201

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 002


Abdul Hamid Tome, SH, MH
Nip. 19840501 201504 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004 .

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN POLIGAMI**

Oleh

RUKMIYANTHY H. ABDUL

NIM : 271414201

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018

Pukul : 08.00 – 09.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Wenny Almoravid Dungga, SH., MH

Nip. 19680522 200112 1 001

(.....)

2. Zamroni Abdussamad, SH.,MH.

Nip. 19700712 200312 1 002

(.....)

3. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH

Nip. 19760208 200312 2 002

(.....)

4. Abdul Hamid Tome, SH.,MH

Nip. 19840501 201504 1 002

(.....)

Gorontalo, 25 Juli 2018

Mengetahui :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

RUKMIYANTHY ABDUL, NIM : 271 414 201, “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN POLIGAMI “ , PEMBIMBING 1 DR. NUR M. KASIM, S.AG, MH, PEMBIMBING II ABDUL HAMID TOME, SH., MH

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil berpoligami.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif di dukung data lapangan. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo, dan penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan poligami dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan juga pengajuan permohonan poligami ini dapat terlaksana apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu istri dan suami serta izin dari pejabat terkait. Sedangkan jika sang istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Dalam hal ini yang menjadi faktor utama untuk PNS berpoligami yaitu terpenuhinya syarat alternatif dimana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan syarat kumulatif yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama selain itu suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Poligami

ABSTRACT

ABDUL RUKMIYANTHY. Student ID: 271414201. "JURIDICAL REVIEW OF POLYGAMY IN CIVIL SERVANTS". Principal Supervisor: DR. NUR M. KASIM, S.AG, MH, Co-supervisor: ABDUL HAMID TOME, SH., MH

The study intends to analyze the juridical review on civil servants who perform polygamy; and to identify the factors contributing the polygamy act. The normative study employed field observation in Religious Court of Gorontalo, in addition, primary and secondary legal material were also involved.

The result shows that the civil servants can perform polygamy by appealing for polygamy to the local religious court, the appeal is granted if both the husband and the wife agree and if the husband is granted permission from the related officials. Otherwise, if the wife does not agree to the appeal; the religious court, if the appeal for polygamy complies with regulations in Article 55 Paragraph (2) and Article 57, is able to grant the wife's disagreement and will hear the wife's testimony. By this decision, both the husband and the wife is capable of appealing for cassation (referring to Article 59 of KHI/Islamic Law Compilation). Further, there are factors that contributes to the polygamy act, i.e. the fulfillment of alternative requirements (wife cannot fully perform her duties as wife) and cumulative requirements (to avoid misbehavior that violates religious norms, and if the husband is able to fair to his wife and children) as regulated in Article 10 Paragraph (2) and (3) of Government Regulation number 10 of 1983, Law number 1 on 1974 concerning Marriage, and Compilation of Islamic Laws.

Keywords: *Civil Servants, Polygamy*

